



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung, Maret 2025



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,

IF. ROWI RAWATIANICE, M. T

Pembina Utama Muda

NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaaan	 7
2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025.....	 7
2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	 7
2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	 8
2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	 8
2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	 9
2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	34
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	38

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Rencana Kerja	48
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Dengan APBD 2025	9
Tabel 2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025	10
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sampai Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	37
Tabel 2.6	Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	40
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-77/BAPPERIDA/000.7/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, Perubahan Renja Disdukcapil Tahun

2025 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-77/BAPPERIDA/000.7/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

- 1.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 1.2 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- 1.3 Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menunjang pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Disdukcapil dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian jumlah program dalam renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan jumlah program yang ada dalam APBD, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, begitu jua dalam APBD ada 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan APBD Tahun 2025, terdapat 17 kegiatan yang direncanakan di Renja dan telah teranggarkan dalam APBD, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan. Dengan demikian maka jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 17 kegiatan dan jumlah kegiatan yang ada di APBD sebanyak 17 kegiatan. Terdapat kesesuaian jumlah kegiatan antara Renja dan APBD tahun 2025.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan APBD tahun 2025, jumlah sub kegiatan yang ada di renja

sebanyak 45 dan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 33 sub kegiatan. Terdapat kesesuaian jumlah sub kegiatan Renja dan APBD Tahun 2025.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Anggaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp 38.026.326.564,- sedangkan anggaran Disdukcapil berdasarkan APBD 2025 adalah sebesar Rp 22.645.308.461,- terdapat selisih anggaran antara APBD dengan Renja 2025 sebesar Rp 15.381.018.103,- hal ini terjadi seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Disdukcapil Tahun 2025 dengan APBD 2025

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025
1	Program	5	5
2	Kegiatan	17	17
3	Sub Kegiatan	45	45
4	Pagu Anggaran	Rp 38.026.326.564,-	Rp 22.645.308.461,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Disdukcapil Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja 2025		APBD 2025	
							Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
1					2	3	4	5	7	8
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	A (85.00)	33.349.324.443,-	A (85.00)	18.157.870.903,-,-
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dok/lap	20.091.191,-	8 dok/lap	20.091.191,-,-
2	12	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.999.603,-	2 dokumen	4.999.603,-
2	12	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130,-	1 dokumen	2.546.130,-
2	12	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130,-	1 dokumen	2.546.130,-
2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	80 dokumen	5.999.788,-	80 laporan	5.999.788,-
2	12	01	2.01	0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	45 data	3.999.540,-	45 data	3.999.540,-
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	26 orang	5.590.590.000,-	26 orang	8.608.243.000,-
2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	5.590.590.000,-	26 orang/ bulan	8.608.243.000,-
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi kebutuhan pegawai	4 paket	1.210.049.000,-	100%	845.042.392,-
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	29.970.000,-	2 paket	98.557.392,-
2	12	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	36.970.000,-	2 orang	110.910.000,-

2	12	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	11.625.000,-	150 orang	35.575.000,-
2	12	01	2.05	1011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	1.131.484.000,-	60 orang	600.000.000,-
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang di Fasilitas Penyediaan dan Pelaporannya	447 Paket/dok/laporan	1.546.768.737,-	447 Paket/dok/laporan	1.298.910.242,-
2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.187.645,-	1 paket	9.187.645,-
2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	913.406.526,-	11 paket	667.577.869,-
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	55.309.840,-	2 paket	53.280.002,-
2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	28.968.327,-	1 paket	28.968.327,-
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	366 dokumen	5.580.000,-	366 dokumen	5.580.000,-
2	12	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	34.531.399,-	10 laporan	34.531.399,-
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	449.785.000,-	55 laporan	449.785.000,-
2	12	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000,-
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31 unit	22.667.234.920,-	31 unit	5.111.358.080,-
2	12	01	2.07	0001	Sub Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	10 unit	310.800.000,-	-	0,-
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1.184.787.000,-	1 unit	1.184.787.000,-
2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 item	22.870.000,-	6 unit	22.870.000,-
2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	10 unit	30.000.000,-	10 unit	60.000.000,-

2	12	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	197.200.000,-	1 unit	197.200.000,-
2	12	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	20.921.577.920,-	3 unit	3.646.501.080,-
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 laporan	1.837.930.595,-	45 laporan	1.797.565.998,-
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	600.000,-	6 laporan	600.000,-
2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	164.000.000,-	36 laporan	164.000.000,-
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.673.330.595,-	3 laporan	1.632.965.998,-
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara	73 unit	476.660.000,-	73 unit	476.660.000,-
2	12	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.990.000,-	1 unit	38.990.000,-
2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	35 Unit	412.700.000,-,-	35 Unit	412.700.000,-
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37 unit	24.970.000,-	37 unit	24.970.000,-
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	• Persentase kepemilikan KTP Elektronik • Persentase kepemilikan kartu keluarga • Persentase kepemilikan kartu identitas anak • Persentase identitas kependudukan digital yang diaktifasi • Persentase penerbitan SKPWN yang diterbitkan berdasarkan permohonan • Persentase penduduk rentan yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	100% 100% 85% 10% 100% 75%	1.546.770.330,- 	100% 100% 85% 10% 100% 75%	1.546.770.330,-

2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan semua dokumen adminduk	4 dokumen pendataan 12 laporan 39.000 dokumen	425.666.400,-	4 dokumen pendataan 12 laporan 39.000 dokumen	425.666.400,-
2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4 dokumen	54.795.600,-	4 dokumen	54.795.600,-
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	361.358.400,-	12 laporan	361.358.400,-
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	39.000 dokumen	9.512.400,-	39.000 dokumen	9.512.400,-
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah paket pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	6 paket	1.113.918.930,-	6 paket	1.113.918.930,-
2	12	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP EI, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	6 paket	1.113.918.930,-	6 dokumen	1.113.918.930,-
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kecamatan	7.185.000,-	12 kecamatan	7.185.000,-
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	7.185.000,-	12 laporan	7.185.000,-
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	- Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk - Persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun - Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan - Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	75% 100% 100% 100%	352.221.880,- 	75% 100% 100% 100%	352.294.120,-

						- Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan - Persentase buku pokok pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti	100%		100%	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil dan paket pengadaan dokumen	19.120 layanan 1 paket	194.999.148,-	19.120 layanan 1 paket	194.978.148,-
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	145.035.000,-	19.120 layanan	145.014.000,-
2	12	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP EI, Formular Dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP EI, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	1 paket	49.964.148,-	4 paket	49.964.148,-
2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	12 kecamatan	147.322.732,-	12 kecamatan	147.415.972,-,-
2	12	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Sosialisai Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 laporan	147.322.732,-	12 laporan	147.415.972,-
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Kecamatan	9.900.000,-	12 Kecamatan	9.900.000,-
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	12 laporan	9.900.000,-	12 laporan	9.900.000,-
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan: - Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama - Persentase inovasi pelayanan yang di implementasikan - Indeks kepuasan Masyarakat - Indeks persepsi anti korupsi	37% 100% Sangat Puas (92.00) IPAK>3,6	2.695.857.561,- 	37% 100% Sangat Puas (92.00) IPAK>3,6	2.506.220.758,-

						dan indeks persepsi kualitas pelayanan	IPKP>3,2		IPKP>3,2	
						Meningkatnya kualitas layanan informasi administrasi kependudukan:				
						• Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses siak dengan baik	100%		100%	
						• Persentase sarana dan prasarana pendukung siak dalam kondisi baik	100%		100%	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	15 PD	47.541.852,-	15 PD	47.541.852,-
2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	47.541.852,-	15 dokumen	47.541.852,-
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan siak	27 laporan	465.563.643,-	27 laporan	320.326.840,-
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25 laporan	257.715.171,-	25 laporan	112.478.368,-
2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	207.848.472,-	2 laporan	207.848.472,-
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	2.182.752.066,-	6 lapotan	2.138.352.066,-
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Laporan	1.902.785.856,-	2 Laporan	1.858.385.856,-
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi	4 Laporan	279.966.210,-	3 Laporan	279.966.210,-

					Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan				
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas layanan informasi administrasi kependudukan: IK = Persentase penyajian data kependudukan	100%	82.152.350,-	100%	82.152.350,-
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain tersusun	3 dokumen	82.152.350,-	3 dokumen	82.152.350,-
2	12	05	2.01	0002	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah laporandan profil perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 laporan	82.152.350,-	3 laporan	82.152.350,-
					Jumlah			38.026.326.564,-		22.645.308.461,-

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2025 dan APBD 2025 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja dengan kesesuaian hampir 100%, namun terjadi ketidaksesuaian pagu anggaran APBD dan Renja 2025. Hal ini terjadiseiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil sampai triwulan II tahun 2025.

Tabel 2.3
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Triwulan II Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025				Catatan
							Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (Rp)	(%)	Kinerja	(%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	A (85.00)	17.888.559.003,-	3.988.256.109,-	22,30%	A (80,60)	94,82%	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	20.091.191,-	2.954.100,-	14,70%	10 dok/lap	11,90%	
2	12	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.999.603,-	2.186.100,-	43,72%	2 dokumen	100%	
2	12	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130,-	0,-	0%	-	0%	

2	12	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130,-	0,-	0%	1 dokumen	100%	
2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	80 laporan	5.999.788,-	768.000,-	12,80%	4 laporan	50%	
2	12	01	2.01	0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	45 data	3.999.540,-	0,-	0%	45 data	100%	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	8.608.243.000,-	3.042.633.558,-	35,34%	39 orang/bln	35,3%	
2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	8.608.243.000,-	3.042.633.558,-	35,34%	39 orang/bln	60%	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	815.587.392,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	98.557.392,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	85.455.000,-	0,-	0%	-	0%	

2	12	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	31.575.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 orang	600.000.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	447 Paket/dok/laporan	1.061.453.342,-	297.254.751,-	22,88%	4 paket	3,88%	
2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.187.645,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	662.663.469,-	159.305.068,-	24,04%	7 paket	63,64%	
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	53.280.002,-	6.049.500,-	11,35%	1 paket	50%	
2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	28.968.327,-	21.621.400,-	74,63%	1 paket	100%	
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	366 dokumen	5.580.000,-	1.140.000,-	20,43%	180 dokumen	49,18%	
2	12	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	34.531.399,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	217.242.500,-	109.138.783,-	24,26%	-	0%	

2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31 unit	5.111.358.080,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	0,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1.184.787.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 item	22.870.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	10 unit	60.000.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	197.200.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3.646.501.080,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 laporan	1.795.165.998,-	507.068.718,-	28,20%	12 laporan	26,07%	
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	600.000,-	0,-	0%	-	0%	

2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36 laporan	164.000.000,-	18.128.448,-	11,05%	12 laporan	33,33%	
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.630.565.998,-	488.940.270,-	29,94%	2 laporan	65,67%	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dipelihara	73 unit	476.660.000,-	138.344.982,-	29,02%	25 unit	37,31%	
2	12	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.990.000,-	16.165.000,-	41,45%	1 unit	100%	
2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	412.700.000,-	120.320.982,-	29,15%	39 unit	100%	
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	37 unit	24.970.000,-	1.859.000,-	7,44%	14 unit	37,84%	
2	12	03			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	• Persentase kepemilikan KTP Elektronik • Persentase kepemilikan kartu keluarga • Persentase kepemilikan kartu identitas anak	100% 100% 85%	1.346.205.930,- 	823.402.546,- 	61,16% 	99,75% 99,59% 78,80%	99,75% 99,59% 78,80%	

						• Persentase identitas kependudukan digital yang diaktifasi • Persentase penerbitan SKPWN yang diterbitkan berdasarkan permohonan • Persentase penduduk rentan yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	10% 100% 75%				- - -	- - -	
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan semua dokumen adminduk	4 dokumen pendataan 12 laporan 39.000 dokumen	227.802.000,-	59.102.346,-	25,94%	13.083	33,50%	
2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4 dokumen	22.730.000,-	1.350.0000,-	5,94%	2 dokumen	50%	
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	198.856.600,-	57.752.346,-	29,04%	8 laporan	66,67%	
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	39.000 dokumen	6.212.400,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Paket Pengadaan Bahan untuk Cetak Dokumen Kependudukan	6 paket	1.113.918.930,-	764.300.200,-	68,61%	-	0%	

2	12	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP EI, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	6 paket	1.113.918.930,-	764.300.200,-	68,61%	-	0%	
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kecamatan	4.485.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	4.485.000,-	0,-	0%	-	0%	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	- Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk - Persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun - Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan - Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan - Persentase kepemilikan akta perceraian pada	75% 100% 100% 100% 100%	269.771.884,-	30.843.222,-	11,43%	99,11%	99,11%	
											91,27%	91,27%	
											100%	100%	
											100%	100%	
											100%	100%	

						semua individu yang perceraianya dilaporkan								
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil dan paket pengadaan dokumen	19.120 layanan 1 paket	146.294.148,-	30.843.222,-	21,08%	5.886 dokumen	30,78%		
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	96.330.000,-	9.600.000,-	9,97%	6.199	32,42%		
2	12	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP EI, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP EI, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	4 paket	49.964.148,-	21.243.222,-	42,51%	2 dokumen	50%		
2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	12 kecamatan	118.527.736,-	0,-	0%	-	0%		
2	12	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 laporan	118.527.736,-	0,-	0%	10 laporan	83,33%		
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 kecamatan	4.950.000,-	0,-	0%	-	0%		
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 laporan	4.950.000,-	0,-	0%	-	0%		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan: Persentase perangkat daerah yang	37%	2.024.272.622,-	1.105.012.659,-	54,59%	11 SKPD	26,82%		

						memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama • Persentase inovasi pelayanan yang di implementasikan • Indeks kepuasan Masyarakat • Indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas layanan informasi administrasi kependudukan: • Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses siak dengan baik • Persentase sarana dan prasarana pendukung siak dalam kondisi baik	100% Sangat Puas (92.00) IPAK>3,6 IPKP>3,2 100% 100%						
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	15 PD	24.639.000,-	5.240.000,-	21,27%	-	0%	

2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	24.639.000,-	5.240.000,-	21,27%	-	0%	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan SIAK	27 laporan	274.995.472,-	64.523.536,-	23,46%	13 laporan	50%	
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25 laporan	83.758.500,-	1.160.000-	1,38%	12 laporan	48%	
2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	191.236.972,-	63.363.536,-	33,13%	1 laporan	50%	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	1.724.638.150,-	1.035.249.123,-	60,03%	2 laporan	33,33%	
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	1.488.341.623,-	831.084.000,-	55,84%	1 laporan	50%	
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	3 laporan	236.296.527,-	204.165.123,-	86,40%	2 laporan	66,67%	

2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas layanan informasi administrasi kependudukan: IK = Persentase penyajian data kependudukan	100%	60.717.350,-	0,-	0%	1 dokumen	100%	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya laporan dan profil kependudukan	3 laporan 3 dokumen	60.717.350,-	0,-	0%	2 dokumen	100%	
2	12	05	2.01	0002	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	60.717.350,-	0,-	0%	-	0%	
					Jumlah			21.589.526.789,-	5.947.914.630,-	27,55%			

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Disdukcapil sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 6.028.121.208,-** atau sekitar 26,61% dari total anggaran **Rp.22.645.308.461,-** Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan aset tak berwujud dan sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, selain itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga sub kegiatan pada Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong belum bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA skpd, diantaranya :

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk belanja makan dan minum rapat belum terealisasi secara maksimal karena bergabung dengan agenda rapat lain (Tindak lanjut : segera merealisasikan anggaran).
2. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD untuk belanja makan dan minum rapat belum terealisasi secara maksimal

karena bergabung dengan agenda rapat lain (Tindak lanjut : segera merealisasikan anggaran).

3. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD untuk belanja makan dan minum rapat belum terealisasi secara maksimal karena bergabung dengan agenda rapat lain (Tindak lanjut : segera merealissai kan anggaran).
4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD belum dilaksanakannya rapat capaian kinerja triwulan II sehingga realisasi masih belum maksimal (Tindak lanjut: segera melaksanakan rapat capaian kinerja triwulan II).
5. Sub kegiatan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah belum ada terealisasi karena menunggu jadwal pelaksanaan rapat yang tepat (Tindak lanjut : segera merealisasikan anggaran) .
6. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak ada masalah.
7. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya masih dalam proses tahap pengerjaan dipenyedia, menunggu proses selesai baru dibayarkan ke penyedia (Tindak lanjut : menunggu proses selesai baru dibayarkan ke penyedia).
8. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi belum terealisasi karena belum ada panggilan diklat kompetensi (Tindak lanjut : menunggu informasi penawaran diklat untuk jabatan fungsional).
9. Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan belum dilaksanakannya kegiatan menunggu jadwal sosialisasi (Tindak lanjut : mengatur jadwal sosialisasi agar bisa segera terealisasi).
10. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan melihat adanya kebijakan efisiensi anggaran, dilakukan penundaan pelaksanaan bimbingan teknis mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran (Tindak lanjut :

dipertimbangkan untuk dilaksanakan setelah pengurangan anggaran melalui perubahan APBD).

11. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor masih proses pembuatan SPJ (Tindak lanjut : segera menyelesaikan proses pengspjan).
12. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak ada masalah.
13. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga tidak ada masalah.
14. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan tidak ada masalah.
15. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak ada masalah.
16. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu masih proses membuat dokumen persiapan belanja (Tindak lanjut : segera menyelesaikan proses pengspjan).
17. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak ada masalah.
18. Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD masih proses pengerjaan penataan arsip (Tindak lanjut : segera melakukan proses pengspjan).
19. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan masih proses pembuatan dokumen persiapan belanja.
20. Sub kegiatan pengadaan mebel masih proses pembuatan dokumen persiapan belanja (Tindak lanjut : segera menyelesaikan proses pembuatan dokumen persiapan belanja dan pengspjan).
21. Sub kegiatan pengadaan aset tak berwujud masih proses pembuatan dokumen persiapan belanja (Tindak lanjut : segera menyelesaikan proses pembuatan dokumen persiapan belanja).

33. Sub kegiatan pengadaan dokumen selain blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan tidak ada masalah.
34. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk tidak ada masalah.
35. Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil permasalahannya ada kesalahan administrasi untuk belanja snack lapangan dalam pengajuan di ecatalog v6 (Tindak lanjut penyelesaian permasalahan di ecatalog v6 dalam proses pengajuan batal pecairan melalui buat e-tiket).
36. Sub kegiatan pengadaan dokumen selain blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan permasalahannya ada di harga satuan belanja cetak lebih rendah di SSH dibanding harga toko (Tindak lanjut : setelah APBD perubahan di sahkan segera direalissaiakan belanja cetak formulir pencatatn sipil).
37. Sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil permasalahan yang dihadapi SPJ masih dalam proses di bidang dan kegiatan sosialisasi belum selesai dilaksanakan (Tindak lanjut : percepatan penyelesaian SPJ agar bisa direalisasikan).
38. Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil permasalahannya pelaksanaan kegiatan pembinaan dialihkan ke TW III (Tindak lanjut : sudah membuat jadwal kegiatan pembinaan dan pengawasan Buku Pokok Pemakaman).
39. Sub kegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan permasalahannya tidak ada.
40. Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan permasalahannya tidak ada.
41. Sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan permasalahannya tidak ada.

22. Sub kegiatan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya belum dilaksanakan sebab anggaran kas ada pada bulan juli (Tindak lanjut : akan dilaksanakan menjelang adanya anggaran kas).
23. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya belum dilaksanakannya kegiatan pengadaan tanah disebabkan hasil konfirmasi status tanah bahwa status tanah adalah aset pemerintah daerah (Tindak lanjut : akan dilakukan pergeseran anggaran pada perubahan APBD) .
24. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menunggu adanya proses pengiriman surat menyurat (Tindak lanjut : segera melakukan pengspjan jika ada proses pengiriman surat).
25. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tidak ada masalah.
26. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tidak ada masalah.
27. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak ada masalah.
28. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tidak ada masalah.
29. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
30. Sub kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan tidak ada masalah.
31. Sub kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tidak ada masalah.
32. Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan tidak ada masalah.

42. Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, permasalahan tidak ada.
43. Sub kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, permasalahannya tidak ada.
44. Sub kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya tidak ada permasalahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perubahan yang diberikan kepada daerah.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan Renstra 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kepemilikan KTP Elektronik
2. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak
3. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun

4. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data berdasarkan perjanjian kerjasama

Tabel 2.4
Target Indikator Sasaran
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	100%
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	85%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	100%
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data berdasarkan perjanjian kerjasama	37%

Kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3 diatas secara garis besar pelaksanaan sebagian besar kegiatan belum berjalan lancar dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan hal triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja 2025 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Renstra 2025-2026 yang telah ditetapkan.

2. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang sampai dengan triwulan II masih belum dilaksanakan dan akan dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja ke kegiatan dan sub kegiatan lain yang sesuai.
3. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lain yang sesuai.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Renstra 2025-2026 berdasarkan data pelayanan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 seperti tabel berikut ini

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	Indikator	SPM/ Sandar Nasional	IKK	IKU	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik	-	✓	✓	100%	100%	100%	-	100%	
2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	-	-	✓	85%	100%	81,35%	-	85%	
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	-	✓	✓	100%	100%	99,27%	-	100%	
4	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data berdasarkan perjanjian kerjasama	-	✓	✓	37%	37%	26,83%	-	37%	

2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tema pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Pondasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal Untuk Tabalong Yang Sejahtera, Maju, Religius Dan Terdepan”

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan Kabupaten Tabalong sebagaimana tabel berikut:

Seiring dengan ditetapkan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yang disertai dengan ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yakni meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan

Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efisien dan efektif

Indikator Tujuan :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan

- Indeks persepsi anti korupsi
- Indeks persepsi kualitas pelayanan

2. Sasaran

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Indikator Sasaran :

- Nilai peningkatan layanan pendaftaran penduduk (Nilai)
- Nilai peningkatan layanan pencatatan sipil (Nilai)
- Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terpenuhi (%)
- Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan (%)
- Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Berikut Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdukcapil	Nilai Evalausi Akip	A	17.888.559.003	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disdukcapil	IK=Persentase Tercapaiannya Pemenuhan Dokumen Pendukung Terkait Penatausahaan	100%	17.858.539.221	
								IK= Persentase Tercapaiannya Pemenuhan Dokumen Pendukung terkait Penatausahaan Keuangan	100%		
								IK= Persentase Tercapaiannya Pemenuhan Dokumen Pendukung Terkait Penatausahaan Umum dan Kepegawaian	100%		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	20.091.191	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	4 dokumen	20.091.191	
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang disusun	5 laporan		
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	8.608.243.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	5 dokumen	8.608.243.000	
								Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan yang disusun	4 laporan		

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	815.587.392	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan	4 dokumen	235.587.392	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pagunya berkurang karena efisiensi (bimtek luar daerah) dan dilakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan penyusunan profil data kependudukan 106.149.650, sub kegiatan pengadaan mibeler 85.600.000, sub kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik 122.916.600, sisanya 29.333.800 ke sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai	2 dokumen		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.061.453.342	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	4 dokumen	3.350.648.450	- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan untuk pembelian isolasi kabel, plester bening, kabel listrik 100m, kabel listrik tembaga 100m, stiker dan klem kabel dan instalasi listrik untuk AC standing sebesar 122.916.600 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagunya bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar 29.333.800, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan sub kegiatan yang ada di bidang dafduk, capil dan paik dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server

											serta instalasi AC, selang pipa karet dan lakban karet - Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Penyediaan pelayanan umum kantor sebesar 300.000.000 yang akan digunakan untuk penataan arsip di 7 kecamatan dan kantor baru Disdukcapil
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	5.111.358.080	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	Jumlah berkas rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	4 berkas	3.735.320.100	Sub kegiatan pengadaan mebel penambahan pagu anggaran dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar 85.600.000 yang akan di gunakan untuk belanja mibeler di ruang pelayanan serta untuk perbaikan meja pelayanan - Sub kegiatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya pagunya berkurang dari pengadaan tanah yang batal dilaksanakan dan pagu akan digeser untuk menambah pagu belanja pembuatan pagar kantor dan sisanya di geser ke sub kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga untuk belanja sarana dan prasarana melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.795.165.998	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Jumlah Berkas Naskah Dinas yang diverifikasi	300 berkas	1.442.195.808	- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan untuk pembelian isolasi kabel, plester bening, kabel listrik 100m, kabel listrik tembaga 100m, stiker dan klem kabel dan instalasi listrik untuk AC standing sebesar 122.916.600 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagunya bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

											dan Bangunan Lainnya dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar 29.333.800, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan sub kegiatan yang ada di bidang daftuk, capil dan paik dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server serta instalasi AC, selang pipa karet dan lakban karet - Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Penyediaan pelayanan umum kantor sebesar 300.000.000 yang akan digunakan untuk penataan arsip di 7 kecamatan dan kantor baru Disdukcapil
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62 unit	476.660.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Jumlah Berkas Pengelolaan/Pemeliharaan Aset	4 laporan	476.660.000	Tidak Berubah
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	- Persentase cakupan kepemilikan KTP Elektronik - Persentase cakupan kepemilikan kartu keluarga - Persentase cakupan kepemilikan kartu identitas anak	100% 100% 100%	1.348.205.930	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	- Persentase kepemilikan KTP Elektronik - Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA) - Persentase Aktivasi Kependudukan Digital (IKD)	99,8% 80% 5%	1.344.160.930	

1.	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen kependudukan yang terbit	36.500 dokumen dan 2 lap	227.802.000	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	- Jumlah Perekaman KTP elektronik - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah IKD yang diaktivasi	219 3.000 37.845	225.757.000	Sub kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pagunya berkurang dan digeser ke sub kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga 2.045.000
2.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase penduduk yang memiliki NIK	99%	1.113.918.930	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase paket pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	6 dokumen	1.113.918.930	
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kec	4.485.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12 kecamatan	4.485.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapi	- persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran - Persentase cakupan akta kelahiran anak 0-18 tahun - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan - Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	70% 100% 100% 100% 100%	269.771.884	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapi	- persentase kepemilikan akta kelahiran - Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun - Persentase kepemilikan akta perkawinan - Persentase kepemilikan akta perceraian - Persentase kepemilikan akta kematian - Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP0 yang ditindaklanjuti	75% 100% 100% 100% 100% 100%	198.744.016	

1.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase permohonan akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	146.294.148	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	- Jumlah dokumen akta kelahiran yang terbit - Jumlah akta kelahiran 0-18 tahun yang terbit - Jumlah dokumen akta kematian yang terbit - Jumlah dokumen akta perkawinan yang terbit - Jumlah akta perceraian yang terbit - Jumlah buku pokok pemkaman yang diterapkan	7.314 dokumen 654 dokumen 1.376 dokumen 90 dokumen 14 dokumen 131 dokumen	163.700.000	- Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pagunya berkurang karena efisiensi dan pergeseran pagu anggaran sebesar 7.830.000 ke Sub kegiatan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP EI, Formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil. Penambahan pagu untuk belanja cetak formulir pendaftaran pencatatan sipil dimana harga di DPA lebih rendah dari harga di pasar sehingga perlu penyesuaian standar harga 2.805.852
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	118.527.736	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	30.094.016	Sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil mengalami pengurangan karena terjadi efisiensi dan pergeseran pagu anggaran ke sub kegiatan pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan sebesar 2.805.852 dan sisanya ke sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 71.027.868
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 kec	4.950.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Jumlah Petugas Pengelola Buku Pokok Pemakaman yang dbina	131 orang	4.950.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapi	- Persentase validitas database kependudukan - Nilai survey kepuasan Masyarakat (SKM) - Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100% Sangat Puas (92.00) 100%	2.024.272.622	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapi	- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - Persentase petugas pelayanan yang kompetensinya meningkat - Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data - Persentase mitra kerja yang memanfaatkan data kependudukan	91% 90% 36,58% 33,33%	2.011.008.902	

1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	40 SKPD	24.639.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	- Jumlah penyajian Kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah - Jumlah sosialisasi pemanfaatan data kepada perangkat daerah - Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan data kepada perangkat daerah - Jumlah penyajian kerjasama pemanfaatan data dengan mitra - Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan data dengan mitra kerja	15 PD 1 kegiatan 2 kegiatan 5 mitra 1 kegiatan	24.639.000	Pagunya tidak berubah, pergeseran belanja dalam sub kegiatan yang sama
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 survey 50 peserta 1 inovasi	274.995.472	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang diadakan Jumlah sarana layanan (aplikasi) yang dikembangkan	1 kegiatan 1 aplikasi	274.995.472	Pagunya tidak berubah, pergeseran belanja dalam sub kegiatan yang sama
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pelaksanaan SIAK (jaringan siak kab dan kec dalam kondisi baik dan peralatan SIAK hard dan software dalam kondisi baik, update data kependudukan 25 desa)	100% 100% 25 desa	1.724.638.150	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara - Jumlah petugas pelayanan yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/workshop/coaching clinic	12 set 55 orang	1.711.374.430	- Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pagunya bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan - Sub kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan pagunya berkurang dan di geser ke sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar 3.057.000,-

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	15 laporan	60.717.350	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	Persentase validitas data kependudukan	90%	166.867.000	
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah laporan data dan profil perkembangan pendudukan	15 laporan	60.717.350	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	- Jumlah dokumen kependudukan skala kabupaten - Jumlah layanan administrasi kependudukan yang terverifikasi	3 dokumen 1.000 dokumen	166.867.000	Pagu bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan di gunakan untuk belanja jilid buku profil dimana harga di DPA lebih rendah dari harga pasar
	Jumlah				21.589.526.789	Jumlah				21.589.526.789	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data kependudukan.
2. Percepatan kepemilikan akta anak 0-18 tahun dan KIA.
3. Pengadaan, peremajaan dan pemeliharaan peralatan operasional SIAK.
4. Peningkatan sumber daya manusia (operator SIAK).
5. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pameran dan peningkatan inovasi pelayanan.
6. Pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Penyusunan profil kependudukan
8. Melengkapi sarana dan prasarana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang baru dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan antara lain menambah pagu anggaran pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan cetak dan penggandaan, penataan arsip dinamis, pengadaan mebel, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /SubKegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	A	33.349.324.443	APBD	A	18.888.559.003	APBD	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	17.868.745.941	APBDP	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	84 dok/lap	20.091.191	APBD	8 dok/lap	20.091.191	APBD	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	20.091.191	APBDP	
2	12	01	2.01	0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.999.603	APBD	2 dokumen	4.999.603	APBD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	4.999.603	APBDP	
2	12	01	2.01	0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130	APBD	1 dokumen	2.546.130	APBD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.546.130	APBDP	
2	12	01	2.01	0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	2.546.130	APBD	1 dokumen	2.546.130	APBD	Jumlah dokumen perubahan rKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen peerubahan RKA SKPD	1 dokumen	2.546.130	APBDP	

2	12	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	80 dok	5.999.788	APBD	80 dok	5.999.788	APBD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80 dok	5.999.788	APBDP	
2	12	01	2.01	0009	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik seKtoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	45 data	3.999.540	APBD	45 data	3.999.540	APBD	Jumlah data statistic sectoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	45 data	3.999.540	APBDP	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 orang	5.590.590.000	APBD	12 bulan	8.608.243.000	APBD	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	8.608.243.000	APBDP	
2	12	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	5.590.590.000	APBD	26 orang/bulan	8.608.243.000	APBD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	8.608.243.000	APBDP	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi kebutuhan pegawai	4 paket	1.210.049.000	APBD	4 paket	815.587.392	APBD	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasikan	100%	235.587.392	APBDP	
2	12	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	29.970.000	APBD	2 paket	98.557.392	APBD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	98.557.392	APBDP	

2	12	01	2.05	0009	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	36.970.000	APBD	2 orang	85.455.000	APBD	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	85.455.000	APBDP	
2	12	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	11.625.000	APBD	150 orang	31.575.000	APBD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	31.575.000	APBDP	
2	12	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	1.131.484.000	APBD	60 orang	600.000.000	APBD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	20.000.000	APBDP	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	447 Paket/laporan	1.546.768.737	APBD	447 paket/dok/lap	1.061.453.342	APBD	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP	100%	3.350.648.450	APBDP	
2	12	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.187.645	APBD	1 paket	9.187.645	APBD	Jumlah paket komponen instansi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	132.104.245	APBDP	
2	12	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	913.406.526	APBD	11 paket	662.663.469	APBD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 paket	1.245.448.435	APBDP	
2	12	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	55.309.840	APBD	2 paket	53.280.002	APBD	Jumlah paket peralatan rumah atangga yang disediakan	5 paket	1.608.397.292	APBDP	

2	12	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 paket	28.968.327	APBD	1 paket	28.968.327	APBD	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 paket	32.344.579	APBDP	
2	12	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	366 dokumen	5.580.000	APBD	366 dokumen	5.580.000	APBD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	336 dokumen	5.580.000	APBDP	
2	12	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	34.531.399	APBD	10 laporan	34.531.399	APBD	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	34.531.399	APBDP	
2	12	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	449.785.000	APBD	55 laporan	217.242.500	APBD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 laporan	217.242.500	APBDP	
2	12	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	50.000.000	APBD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	1 dokumen	75.000.000		
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	31 unit	22.667.234.920	APBD	31 unit	5.111.358.080	APBD	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	3.735.320.100	APBDP	
2	12	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	10 unit	310.800.000	APBD	-	0	APBD	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	10 unit	0	APBDP	
2	12	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1.184.787.000	APBD	1 unit	1.184.787.000	APBD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1.184.787.000	APBDP	
2	12	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 item	22.870.000	APBD	6 item	22.870.000	APBD	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 paket	152.802.160	APBDP	

2	12	01	2.07	0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	10 unit	30.000.000	APBD	10 unit	60.000.000	APBD	Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	10 unit	60.000.000	APBDP	
2	12	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	197.200.000	APBD	1 unit	197.200.000	APBD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	197.200.000	APBDP	
2	12	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	20.921.577.920	APBD	3 unit	3.646.501.080	APBD	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	2.140.530.940	APBDP	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45 laporan	1.837.930.595	APBD	45 laporan	1.795.165.998	APBD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan	100%	1.442.195.808	APBD P	
2	12	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	600.000	APBD	6 laporan	600.000	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	600.000	APBDP	
2	12	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36 laporan	164.000.000	APBD	36 laporan	164.000.000	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	180.080.000	APBDP	
2	12	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.673.330.595	APBD	3 laporan	1.630.565.998	APBD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.261.515.808	APBDP	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah asset yang dipelihara	73 unit	476.660.000	APBD	73 unit	476.660.000	APBD	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar	100%	476.660.000	APBDP	

2	12	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.990.000	APBD	1 unit	38.990.000	APBD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.990.000	APBDP	
2	12	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 Unit	412.700.000	APBD	35 Unit	412.700.000	APBD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	412.700.000	APBDP	
2	12	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	37 unit	24.970.000	APBD	37 unit	24.970.000	APBD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37 unit	24.970.000	APBDP	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTAN PENDUDUK	• Persentase kepemilikan KTP Elektronik • Persentase kepemilikan Kartu Keluarga • Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak • Persentase identitas kependudukan digital yang diaktifasi • Persentase penerbitan SKPWNI yang diterbitkan	100% 100% 100% 10% 100%	1.546.770.330	APBD	100% 100% 100% 10% 100%	1.348.205.930	APBD	• Persentase kepemilikan KTP Elektronik • Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak • Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	99,80% 80% 5%	1.344.160.930	APBDP	

						berdasarkan permohonan											
						• Persentase penduduk rentan yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	75%			75%							
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan semua dokumen adminduk	4 dokumen pendataan 12 laporan 39.000 dokumen	425.666.400	APBD	4 dokumen pendataan 12 laporan 39.000 dokumen	227.802.000	APBD	- Jumlah perekaman KTP Elektronik - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah IKD yang diaktivasi	219 3.000 37.845	225.757.000	APBDP	
2	12	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4 dokumen	54.795.600	APBD	4 dokumen	22.730.000	APBD	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan	4 dokumen	20.685.000	APBDP	
2	12	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	361.358.400	APBD	12 laporan	198.859.600	APBD	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	198.859.600	APBDP	
2	12	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	39.000 dokumen	9.512.400	APBD	39.000 dokumen	6.212.400	APBD	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa kependudukan	39.000 dokumen	6.212.400	APBDP	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah paket pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	6 paket	1.113.918.930	APBD	6 paket	1.113.918.930	APBD	Jumlah paket pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	4 paket	1.113.918.930	APBDP	
2	12	02	2.02	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP EI, Formulir	6 paket	1.113.918.930	APBD	6 paket	1.113.918.930	APBD	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan	6 dokumen	1.113.918.930	APBDP	

					selain Blangko KTP El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan							buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan				
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12 kecamatan	7.185.000	APBD	12 kecama tan	4.485.000	APBD	Jumlah laporan hasil penerbitan dokumen	12 laporan	4.485.000	APBDP	
2	12	02	2.04	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	7.185.000	APBD	12 laporan	4.485.000	APBD	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	4.485.000	APBDP	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	• Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk • Persentase kepemilikan akta anak 0-18 tahun • Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan • Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan • Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua	75% 100% 100% 100% 100%	352.221.880	APBD	75% 100% 100% 100% 100%	269.771.884	APBD	• Persentase akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan pelaporan • Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun • Persentase akta kematian yang diterbitkan berdasarkan pelaporan • Persentase akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan pelaporan • Persentase akta yang diterbitkan berdasarkan pelaporan • Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75% 100% 100% 100% 100%	198.744.016	APBDP	

						individu yang perceraianya dilaporkan							yang ditindaklanjuti				
						• Persentase buku pokok pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti	100%			100%							
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil dan Paket Pengadaan Dokumen	19.120 layanan 1 paket	194.999.148	APBD	19.120 layanan 1 paket	146.294.148	APBD	• Jumlah dokumen akta kelahiran yang terbit • Jumlah dokumen akta kelahiran anak 0-18 tahun yang terbit	7.314 akta 654 akta	163.700.000	APBDP	
2	12	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	145.035.000	APBD	19.120 layanan	96.330.000	APBD	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	19.120 layanan	88.500.000	APBDP	
2	12	03	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP El, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP El, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	1 paket	49.964.148	APBD	4 paket	49.964.148	APBD	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	4 paket	75.200.000		
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	12 kec	147.322.732	APBD	12 kec	118.527.736	APBD	• Jumlah akta perkawinan yang terbit • Jumlah akta perceraian yang terbit	87 pasang 12 pasang	30.094.016	APBDP	
2	12	03	2.02	0008	Sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 laporan	147.322.732	APBD	12 laporan	118.527.736	APBD	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 laporan	30.094.016		
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Pembinaan dan	12 Kec	9.900.000	APBD	12 Kec	4.950.000	APBD	• Jumlah akta kematian yang terbit	1.324 akta	4.950.000	APBDP	

					Pencatatan Sipil	Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							• Jumlah buku pokok pemakaman yang diterapkan	131 buku			
2	12	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan	12 lap	9.900.000	APBD	12 lap	4.950.000	APBD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	12 laporan	4.950.000	APBDP	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan: • Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama • Persentase inovasi pelayanan yang diimplementasikan • Indeks kepuasan Masyarakat • Indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kualitas pelayanan Meningkatnya	37% <										

						kualitas layanan informasi kependudukan: • Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses siak dengan baik • Persentase sarana dan prasarana pendukung siak dalam kondisi baik	100% 100%			100% 100%								
2	12	04	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 PD	47.541.852	APBD	15 SKPD	24.639.000	APBD	• Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data • Jumlah inovasi yang diterapkan	15 PD 13 inovasi	24.639.000	APBDP		
2	12	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	47.541.852	APBD	30 dokumen	24.639.000	APBD	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	24.639.000	APBDP		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan siak	27 laporan	465.563.643	APBD	27 laporan	274.995.472	APBD	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	24 laporan	83.758.500	APBDP		
2	12	04	2.03	0003	Sub Kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25 laporan	257.715.171	APBD	25 laporan	83.758.500	APBD	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25 laporan	83.758.500	APBDP		

2	12	04	2.03	0005	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	207.848.472	APBD	2 laporan	191.236.972	APBD	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	191.236.972	APBDP	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	6 laporan	2.182.752.066	APBD	6 laporan	1.724.638.150	APBD	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	6 laporan	1.711.374.430	APBDP	
2	12	04	2.04	0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	1.902.785.856	APBD	2 laporan	1.488.341.623	APBD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	1.504.938.863	APBDP	
2	12	04	2.04	0003	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4 laporan	279.966.210	APBD	3 laporan	236.296.527	APBD	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	3 laporan	206.435.567	APBDP	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas layanan informasi administrasi kependudukan: IK=Persentase penyajian data kependudukan	100%	82.152.350	APBD	100%	60.717.350	APBD	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	166.867.000	APBDP	

2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	3 dok	82.152.350	APBD	3 dok	60.717.350	APBD	Persentase profil dan data kependudukan yang valid	86%	166.867.000	APBDP	
2	12	05	2.01	02	Sub Kegiatan penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah laporan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lainnya yang tersusun	3 lap	82.152.350	APBD	3 dok	60.717.350	APBD	Jumlah laporan dan profil perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lainnya yang tersusun	3 dok	166.867.000	APBDP	
					Jumlah			38.026.326.564			21.589.526.789				21.589.526.789		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Disdukcapil Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini berpedoman pada Perubahan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan RKPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. TABALONG,



H. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda
Nip. 19661125 199403 2 003